

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal yang sama penting dan strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan salah satu penentu kemajuan bagi suatu Negara Gita & Sinarwati, (2020) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyampaikan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang Pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga Pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat Undang-Undang tersebut adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan Pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat Pendidikan Dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat (Susanti, 2021).

Dana BOS adalah bentuk bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada sekolah di seluruh negeri. Tujuan utama dari dana ini adalah untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan operasional mereka dengan baik Dana bos ini tidak hanya mencakup biaya pengajaran, tetapi juga mencakup berbagai kebutuhan lainnya seperti perawatan

gedung, pembelian buku dan alat tulis, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan potensi siswa, di mana kepala sekolah bertanggung jawab untuk mengelola dana BOS ini dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi (Nursiniah., 2024).

Penyaluran dana BOS dilakukan secara bertahap setiap triwulan dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan jumlah siswa. Pengelolaan dana BOS dilakukan oleh sekolah dengan melibatkan berbagai pihak seperti kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah. Pengelolaan ini harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana. Sekolah diwajibkan membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang menjadi acuan dalam penggunaan dana BOS (Ramdhani, 2022).

Menurut Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun 2012 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Dalam pelaksanaannya pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada buku petunjuk teknis penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kementerian teknis yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program BOS(Mendikbudristek RI, 2022). Dalam rangka implementasi penerapan MBS di sekolah, dana BOS diharapkan dapat dikelola secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan dana BOS secara akuntabel artinya dalam pengelolaan dana BOS, sekolah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS kepada pemerintah maupun masyarakat (Gita & Sinarwati, 2020). Pentingnya pengelolaan

BOS dalam transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS kepada publik merupakan salah satu wujud kontrol dari masyarakat (Sephiningrum et al., 2023).

Masyarakat merupakan komponen yang berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan (Batubara, 2023). Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan sekolah dan penggunaan dana BOS belum berjalan dengan baik (Hidayat., 2019). Masih banyak sekolah yang tidak ingin laporan penggunaan dana BOS diketahui oleh masyarakat. Sekolah berusaha mereduksi keterlibatan komite sekolah dan orang tua murid dengan sekedar berperan serta dalam rapat, mendatangi pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS), dan pertanggungjawaban sesuai dengan tata kelola sekolah. Masih rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan dana BOS oleh sekolah ditandai dengan tidak dipublikasikan atau belum pernah dilakukan audit oleh Akuntan Publik terkait dana BOS. Hal tersebut menggambarkan masih rendahnya partisipasi komite sekolah dan orang tua murid dalam pengelolaan keuangan sekolah (Oktavia & Trihantoyo, 2023).

Dalam pengelolaan dana BOS seringkali menemui berbagai kendala dan tantangan. Beberapa fenomena yang sering terjadi seperti, ketidaksesuaian penggunaan dana dengan perencanaan awal, penyalahgunaan dana oleh oknum tertentu, keterlambatan dalam penyaluran dana, kurangnya kapasitas manajemen di tingkat sekolah dalam mengelola dana secara efektif (Sine et al., 2021). Kapasitas manajemen keuangan sekolah sangat berpengaruh pada tingkat akuntabilitas. Pelatihan manajemen keuangan sangat dibutuhkan. Partisipasi aktif dari

masyarakat dan komite sekolah meningkatkan pengawasan dan transparansi, kebijakan yang jelas dan panduan yang rinci dari pemerintah membantu sekolah dalam pengelolaan dana yang akuntabel, penggunaan Sistem Informasi Keuangan Sekolah (SIKS) membantu meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan.

Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di Papua menghadapi sejumlah fenomena yang mencerminkan tantangan dan peluang dalam konteks pendidikan di daerah tersebut. Salah satu isu utama adalah sasaran dan akses. Banyak sekolah di Papua terletak di daerah terpencil dengan akses yang sulit, yang menghambat pengiriman dana dan koordinasi antara pemerintah daerah dan sekolah. Ketidakstabilan transportasi dan jaringan komunikasi yang terbatas sering kali memperlambat proses pencairan dana, sehingga mengganggu operasional sekolah yang sangat bergantung pada dana tersebut.

Selain itu, terdapat tantangan dalam kapasitas manajerial di tingkat sekolah. Banyak pengelola sekolah terutama di daerah yang lebih terpencil belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam administrasi keuangan. Hal ini menyebabkan pengelolaan dana BOS menjadi kurang efisien dan transparan, Misalnya ada laporan tentang penggunaan dana yang tidak sesuai dengan penggunaan atau bahkan ketidakpahaman tentang tata cara pelaporan yang benar. Tanpa pemahaman yang kuat tentang pengelolaan anggaran dana BOS tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

SMA Negeri 1 Arso adalah salah satu sekolah menengah yang berada di Kabupaten Kerom Provinsi Papua. SMA Negeri 1 Arso salah satu penerima anggaran Dana BOS yang diberikan oleh pemerintah Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada bendahara SMA Negeri 1 Arso diketahui bahwa ada permasalahan yang dihadapi oleh tim BOS SMA Negeri 1 Arso ini yaitu pada saat penyusunan RKAS (rencana kegiatan dan anggaran sekolah) melalui aplikasi Dana BOS terbaru ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) salah satu permasalahannya seperti ketika tim BOS SMA Negeri 1 Arso telah menyusun program dan sudah memenuhi delapan (8) standar pendidikan dan telah dibuat ke dalam rencana anggaran kerja tahunan lalu ketika di input ke aplikasi ARKAS yang terbaru ada yang tidak bisa terinput anggarannya dan tidak ditemukan jenis dan kode rekeningnya atau tidak sesuai.

SMA Negeri 1 Arso terdapat fenomena yang mencerminkan tantangan dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Meskipun BOS bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pelaksanaan di lapangan sering kali mengalami kendala, kurangnya pemahaman para pengelola sekolah dan komite tidak selalu memiliki pemahaman yang cukup mengenai mekanisme dan tujuan penggunaan dana BOS yang berdampak pada alokasi dana yang tidak optimal. Pencatatan dan pelaporan yang lemah sistem pencatatan dan laporan yang belum memadai mengakibatkan ketidakjelasan dalam penggunaan dana, sehingga sulit untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada pihak-pihak terkait. Partipasi masyarakat yang minim rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan

penggunaan dana BOS membuat pengelolaan menjadi kurang transparan dan masyarakat tidak sepenuhnya mengetahui alokasi dan penggunaan dana, sistem audit yang tidak konsisten keterbatasan audit eksternal yang rutin membuat pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS lemah, sehingga potensi penyalahgunaan dana tidak terdeteksi dengan cepat melalui penguatan sistem pelaporan, peningkatan pelatihan bagi pengelola, serta mendorong partisipasi masyarakat, diharapkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BOS dapat ditinggikan.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini, diantaranya :

(Hidayat et al., 2019) menyatakan bahwa yang mempengaruhi keberhasilan program BOS adalah pengelolaan dana program BOS dan seluruh sumber dayanya. Pentingnya Pengelolaan Dana BOS yaitu, jika dikelola dengan baik, akan membantu tercapainya tujuan program BOS secara efektif dan efisien (Batubara, 2023). Sekolah berperan penting dalam menentukan penggunaan dana BOS, karena sekolah merupakan lembaga yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana BOS. Kesalahpahaman pengelolaan dapat menghambat pelaksanaan pengelolaan dana BOS. Dikarenakan belum adanya petunjuk khusus dalam Petunjuk Teknis BOS, maka dilakukan terjemahan yang berbeda oleh Pengelola Dana BOS (Sine., 2021). Hal ini menjadi permasalahan dan dapat menimbulkan dugaan penyelewengan.

Menurut (Julinar, 2023), terdapat tiga pilar yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu: (1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikut sertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah, (2) adanya standar kinerja, disetiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

Menurut (Nursiniah et al., 2024), bahwa pemerintahan yang *accountable* memiliki ciri ciri sebagai berikut: (1) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat, (2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, (3) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, (4) Mampu menjelaskan dan mempertanggung jawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan (5) Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggung jawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Tujuan akuntabilitas pendidikan adalah agar terciptanya kepercayaan publik terhadap sekolah (Riski Fauzi Ramdhani, 2022).

Kepercayaan publik yang tinggi akan sekolah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula dalam pengelolaan manajemen sekolah (Hindahsari et al., 2022). Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya. Penyelenggara sekolah harus memahami bahwa mereka

harus mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada publik. Selain itu, tujuan akuntabilitas adalah menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikut sertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggung jawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik.

Hasil penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS yang baik membutuhkan akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab sekolah dalam mengelola dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar (Hindahsari et al., 2022). Tanpa akuntabilitas dan transparansi yang memadai, ada risiko penyalahgunaan dana dan tidak tercapainya tujuan peningkatan kualitas pendidikan (Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2022).

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh (Batubara, 2023) yang berjudul "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri X di Kabupaten Y". Penelitian (Batubara, 2023) menemukan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan minimnya pelaporan yang transparan. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian (Batubara, 2023) terletak pada lokasi penelitian, yaitu SMA Negeri 1 Arso, serta pada pendekatan metodologis yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi.

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi oleh penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana BOS Di SMA Negeri 1 Arso.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 1 Arso ?
2. Bagaimana transparansi dalam pelaporan dan penggunaan dana BOS di SMA Negeri 1 Arso ?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Arso ?
4. Sejauh mana keterlibatan pihak sekolah , komite sekolah, dan masyarakat dalam proses pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Arso ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Arso.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi transparansi pelaporan dan penggunaan dana BOS di SMA Negeri 1 Arso .
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Arso.
4. Untuk menilai peran serta pihak sekolah, komite sekolah, dan masyarakat dalam proses pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Arso..

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan bantuan operasional sekolah BOS di SMA Negeri 1 Arso kabupaten kerom.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memperkaya literatur tentang teori akuntabilitas dan transparansi, khususnya dalam konteks pengelolaan dana BOS di sekolah dasar. Hasilnya dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik pada topik serupa. Kontribusi penelitian ini terhadap ilmu manajemen pendidikan sangat penting, terutama dalam pengembangan model pengelolaan keuangan yang lebih baik di sekolah-sekolah. Penelitian ini juga menguji penerapan teori akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS, membantu mengevaluasi relevansi dan efektivitas teori-teori tersebut dalam situasi nyata.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat digunakan oleh SMA Negeri 1 Arso untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS, membantu sekolah mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan dalam sistem pengelolaan keuangan mereka. Penelitian ini bisa menjadi panduan bagi kepala sekolah dan staf administrasi dalam mengelola dana BOS secara lebih efektif dan

transparan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pendidikan di sekolah tersebut. Temuan penelitian ini bisa menjadi masukan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Kerom dan pihak-pihak terkait untuk merumuskan kebijakan yang mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dengan meningkatkan transparansi, penelitian ini dapat mendorong partisipasi aktif dari orang tua siswa dan masyarakat sekitar dalam pengawasan pengelolaan dana sekolah, menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan kolaboratif dalam proses pendidikan. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas, baik secara teoritis, metodologis, maupun praktis, untuk peningkatan kualitas pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Arso serta sekolah-sekolah lain di wilayah Kabupaten Kerom.